

PPS Kerja 24 Jam, Kalau Tidak Bisa Silakan Mundur

SERANG (IM)- Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditekan bekerja tanpa batas waktu atau 24 jam. Hal itu sudah menjadi tugas agar Pemilu berjalan baik.

Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan, tantangan menjadi penyelenggara pemilu tidak mudah, terutama ada perubahan jam tidur.

Sebab sejak dilantik, anggota PPS sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara. Sehingga jika ada yang tidak sanggup, diminta segera mengundurkan diri.

"PPS bekerjanya 24 jam, kalau tidak bisa tugas 24 jam silakan mengundurkan diri. Ini tugas berat kalau dilakukan sendiri, perlu dilakukan kekompanan," katanya saat lantik PPS, Selasa (24/1).

Ia menegaskan, anggota PPS yang jumlahnya menca-

pai 201 orang, wajib menjaga integritas sesuai perundang-undangan.

"Harus bekerja sesuai perundang-undangan. Yang dilantik 201 karena satu keluarga ada 3 PPS," tegasnya.

Ia mengingatkan, akan banyak godaan yang dihadapi anggota PPS dari oknum-oknum peserta Pemilu. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme harus dijunjung tinggi.

"Menjadi PPS integritas. Karena banyak godaan-godaannya, bapak ibu bisa melewatinya baik materi dan sebagainya," imbuhnya.

Di sisi lain, tugas pertama yang akan dijalankan PPS adalah membentuk pemutakhiran data pemilih (Pantarlil). "Sebentar lagi ada perekrutan Pantarlil dan itu tugas PPS," ungkapnya. ● **pra**

BKKBN Gelar Grebek 2023 Atasi Stunting di Kampung Baduy

LEBAK (IM)- "Grebek 2023 merupakan kolaborasi bersama Mitra Kerja BKKBN yaitu TNI, IBI, Pemerintahan Provinsi Banten, Pemerintahan Kabupaten Lebak, Baznas, Tim Penggerak PKK dan Catur Dakwah Crane Farmasi," kata Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Nurziky Permanajati dalam keterangannya, Selasa (24/1).

Dalam Grebek 2023 yang digelar di Kampung Baduy yakni di Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Nurziky menuturkan penangan stunting pada keluarga digencarkan dari hulu dengan intervensi penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan laporan G-Form sampai dengan 20 Januari 2023 pukul 07.00 WIB, capaian target provinsi Banten telah melebihi target yakni 129,97 persen atau sebanyak 8.938 akseptor KB yang terlayani, yang terdiri dari 145 akseptor Metode Operasi Wanita (MOW), satu akseptor Metode Operasi Pria (MOP), 1.754 akseptor IUD dan 7.038 akseptor implan.

Nurziky melanjutkan, terpilihnya Kampung Baduy sebagai lokasi penggarapan program bersama merupakan upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesehatan di daerah pedalaman. Terlebih lagi dari hasil PK-21, sebanyak 47 keluarga terpantau berisiko stunting atau mencapai 100 persen.

"Tentunya saja ini menjadi perhatian bersama untuk segera dilakukan intervensi pencegahan stunting di desa tersebut. Dari hasil pelayanan

KB Implan, terdapat 10 akseptor dari penduduk Baduy. Artinya, program Bangga Kencana sudah menjadi kebutuhan pasangan usia subur di Baduy," kata Nurziky.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina menambahkan selain sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pelayanan KB MKJP di daerah tersebut juga bertujuan untuk menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) dan meningkatkan cakupan peserta KB, sambil mengoptimalkan pemanfaatan anggaran DAK BOKB yang serapannya masih sangat rendah sampai dengan akhir tahun 2022.

Pelayanan Program Bangga Kencana, khususnya Pelayanan KB MKJP dilakukan oleh seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi Indonesia secara serentak, pada tanggal 17-19 Januari 2023 untuk di wilayah Provinsi Banten yang dipusatkan di Kabupaten Lebak.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar menyebutkan pada akhir tahun 2022 lalu, angka stunting di Provinsi Banten menurun. Namun pihaknya akan terus mengencakan pendekatan yang menyeluruh. "Kita upayakan tahun 2024 nanti angka stunting di Provinsi Banten di bawah 14 persen seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kita akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbasis kearifan lokal setempat," kata dia. ● **pra**

Tarif Parkir di UPTD Samsat Cikokol Gratis



Kantor UPTD Samsat Cikokol.

TANGERANG (IM)- UPTD Samsat Cikokol melalui Bapenda Provinsi Banten terus melakukan terobosan setiap tahunnya. Salah satunya memberikan kepuasan ke wajib pajak (WP), tidak mematok biaya parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang akan bayar pajak di Samsat Cikokol.

Pernyataan ini disampaikan Kepala UPTD Samsat Cikokol, Syarifudin saat kongkow bareng dengan seluruh media liputan di Kota Tangerang, Selasa (24/1). "Saya menyarankan agar tidak mematok atau bayar se-iklannya tarif parkir, ini adalah komitmen saya kepada WP yang datang ke Samsat Cikokol," tegas Syarifudin.

Menurut Syarifudin, selain tidak mematok tarif parkir, untuk kendaraan WP dalam sisi keamanan jika memasuki

pintu masuk Samsat Cikokol dijaga Satpam dan Polisi jaga. Tujuannya agar kendaraan roda dua dan roda empat WP meminimalisir curamnor di parkir. "Nah, ini komitmen saya agar kendaraan WP aman dan nyaman," terangnya.

Nah, untuk WP yang memberikan tarif parkir ke petugas satpam, dirinya tidak menampik pemberian itu memang ada. Namun hasil parkir tersebut dikelola dengan baik, jika sewaktu-waktu diperlukan akan dikeluarkan. "Petugas Satpam kami saya sarankan tidak meminta tarif parkir ke WP. Tetapi kalau diberi dengan ikhlas petugas kami menemaninya," paparnya.

Terkait beredarnya informasi Kepala UPTD Samsat Cikokol perintah petugas parkir atau Satpam di area samsat untuk pungut parkir, dia membantahnya. ● **joh**



IDN/ANTARA

ZIARAH SAMBUT HARI BHAKTI IMIGRASI

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto (kiri) menabur bunga saat ziarah menyambut Hari Bhakti Imigrasi di Taman Makam Pahlawan di Ceceri Kota Serang, Selasa (24/1). Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-73 akan berlangsung tanggal 26 Januari mendatang dengan tema Imigrasi Baru untuk Indonesia Maju.

Subsidi Sektor Transportasi Berhasil Tekan Laju Inflasi di Kota Tangerang

Pemkot Tangerang mengeluarkan subsidi mencapai Rp32 miliar untuk menggratiskan Bus Tayo dan angkutan perkotaan Si Benteng selama kurun waktu September hingga Desember 2022. Dan ini jadi solusi jitu menekan laju inflasi. Sebab naiknya laju inflasi di Kota Tangerang adalah sektor transportasi, kata Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah.

TANGERANG (IM)- Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menyatakan pemberian subsidi pada angkutan perkotaan yakni Bus

Tayo dan Si Benteng sebesar Rp32 miliar berhasil menekan laju inflasi pada 2022.

Ia mengatakan tarif Bus Tayo dan angkutan perkotaan

Si Benteng Rp2.000 yang kemudian digratiskan selama kurun waktu September hingga Desember 2022.

"Pemkot mengeluarkan subsidi mencapai Rp32 miliar untuk menggratiskan selama kurun waktu September hingga Desember 2022 dan jadi solusi jitu menekan laju inflasi. Sebab naiknya laju inflasi di Kota Tangerang adalah sektor transportasi," ujar dia pada Rapat Koordinasi Pengendalian Dalam Negeri, Tito Karnavian di Tangerang, Selasa (24/1).

Ia menambahkan langkah strategis lain yang ditempuh Pem-

kot Tangerang dalam menekan laju inflasi mengoperasikan mobil pasar keliling si Jampang (Belanja Gampang) yang dikelola oleh PD Pasar Kota Tangerang dan berfungsi sebagai pengendali harga komoditas di pasaran. "Yang membedakan adalah, harganya menggunakan harga di pasar induk dan tidak mengambil profit kepada masyarakat. Dan beroperasi di wilayah perumahan yang jauh dari pasar," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi paparan terkait penanganan inflasi di Kota Tangerang dan menyebut wali kota teliti, detail, dan menguasai masalah, terlebih berbagai kebijakan yang diambil melibatkan peran serta

Forkopimda di daerah.

"Ibarat dokter, karena menguasai masalah maka diagnosis tepat dan terapinya tepat," kata Mendagri Tito.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan kota Tangerang, Yeti Rohaeti menuturkan inflasi Kota Tangerang pada 2022 berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4,6 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen untuk tahun yang sama.

"Kota Tangerang bersama Sulawesi Barat merupakan daerah dengan tingkat inflasi terendah secara nasional," ujarnya. ● **pp**

Dinkes Kota Tangerang Siapkan 13.000 Dosis Vaksin Penguat Kedua

TANGERANG (IM)- Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten menyiapkan 13.000 dosis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi penguat kedua atau suntikan keempat dengan sasaran warga usia 18 tahun keatas mulai Selasa (24/1). Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni di Tangerang, Selasa, mengatakan untuk dosis vaksin COVID-19 penguat kedua ini telah disiapkan sejak pekan lalu.

"Adapun, dosis vaksin yang telah disiapkan untuk 'booster' (penguat) kedua ini baru hanya satu merek produk vaksin COVID-19 saja," katanya.

Dia menjelaskan pemberian vaksin COVID-19 penguat kedua ini merupakan implementasi dari arahan Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Sebelumnya, vaksinasi penguat dosis kedua hanya diberikan terbatas untuk tenaga kesehatan (nakes) atau warga lanjut usia. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin tersebut, cukup datang dan mengunjungi fasilitas kesehatan yang mel-

yani vaksinasi COVID-19.

"Ini bisa untuk masyarakat umum, syaratnya umur lebih dari 18 tahun, terus jarak antara 'booster' pertama dan kedua enam bulan," katanya.

Syarat penerima vaksin COVID-19 penguat kedua yakni sudah mendapatkan vaksin lengkap ditambah vaksin penguat dosis pertama, memiliki jarak enam bulan dari suntikan penguat pertama, warga berusia minimal 18 tahun, lansia dan mempunyai tiket untuk mendapatkan vaksin penguat di aplikasi Peduli Lindungi.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan penjelasan bahwa vaksinasi dosis penguat kedua bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi. Di Kota Tangerang, katanya, masyarakat bisa mendapatkan vaksin dosis tersebut di fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi, seperti di Puskesmas Cipondoh, Puskesmas Sukasari, Puskesmas Poris Plawad, Puskesmas Neglasari, Puskesmas Panunggan Barat. ● **pp**

Pemkot Tangsel Fokuskan Drainase Lingkungan Penanganan Banjir

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tahun 2023 masih akan fokus mengenai penanganan banjir berupa pekerjaan drainase di lingkungan hingga permukiman dan sejumlah ruas jalan utama.

"Untuk infrastruktur masih akan melanjutkan penanganan banjir dan juga target penerangan jalan umum yakni 100.000 lampu masuk perumahan," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan di Tangerang, kemarin.

Selain bidang infrastruktur, Pemkot Tangerang Selatan juga memiliki program bidang sumber daya manusia (SDM) yakni menyiapkan 1.000 beasiswa bagi sekolah swasta dan tahfidz Quran. Lalu pemberian intensif untuk ketua RT/RW, sekretaris, dan bendahara untuk

melancarkan program kerja. Ia menyakini, dimulai dari SDM dan masyarakat serta pimpinan yang saling bersinergi maka program akan berjalan dengan maksimal.

"Program kesehatan masih kita lanjutkan ngider sehat yang semakin lebih luas lagi jangkauannya dan peningkatan pelayanannya," ujarnya.

Pemkot Tangerang Selatan, lanjutnya, juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak baik tokoh masyarakat, alim ulama, hingga para pemuda sebagai salah satu upaya untuk membangun sinergitas dan konsistensi dalam program pembangunan. Ia mengatakan pada tahun 2022 sudah banyak program yang berjalan dengan baik dan pada tahun 2023 dari hasil Musrenbang kemudian akan dievaluasi. ● **pp**

Tak Hanya Pejabat, Pegawai Honoror di Unila Ikut 'Titip' Calon Mahasiswa

LAMPUNG (IM)- Perkaratitip menip berbayar calon mahasiswa baru (camaba) di Universitas Lampung (Unila) tidak hanya dilakukan para pejabat kampus. Pegawai honoror di rektorat pun menitipkan camaba untuk diluluskan masuk Unila.

Fakta ini kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa (24/1).

Keterangan ini diketahui saat jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Fajar Pramukti Putra, seorang pegawai honoror di Rektorat Unila. Fajar mengaku menerima dua camaba titipan untuk diluluskan ke Fakultas Kedokteran Unila melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau jalur reguler.

Dua camaba itu bernisial MVA yang dititipkan oleh Fery Antonius dan FLH yang dititipkan oleh Linda Fitri. Fajar mengatakan dia dihubungi oleh Fery Antonius (saksi) yang ingin memasukkan anaknya itu ke Fakultas Kedokteran. Fajar pun men-

datangi rumah Fery Antonius. Titipan camaba ini kemudian diberikan kepada terdakwa M Basri (eks Ketua Senat). Jaksa sempat mendesak Fajar bagaimana dia mengenal Fery Antonius dan hubungan mereka. "Hanya kenal saja," kata Fajar dalam persidangan, Selasa.

Terkait hal ini, Fajar sempat ditegur majelis hakim lantaran berbelit-belit dalam memberi keterangan, khususnya "ketidaktahuannya"

"Tidak mungkin saudara tidak tahu (peran M Basri), saudara ini pegawai Unila, ngomong saja terus terang, saya ingat saksi ya," kata Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan.

Dua Camaba Rp 625 Juta
Terkait peran Fajar dalam penitipan camaba tersebut, dua orangtua yang melalui "jalur" penitipan itu memberikan uang sebesar Rp 625 juta. Pada 21 Juni 2022, Fery Antonius memberikan uang sebesar Rp 325 juta kepada M Basri untuk diserahkan kepada terdakwa Heryandi (eks Warek I). "Uang ini diserahkan di ru-

ang kerja Warek I Heryandi," kata jaksa penuntut.

Di bulan yang sama, orangtua FLH, yaitu Linda Fitri juga menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada M Basri di ruang kerja untuk diberikan kepada Heryandi.

Pada persidangan, Fajar mengaku hanya mendapatkan uang persekot sebesar Rp 2 juta dari M Basri, meski sudah "menghasilkan" Rp 625 juta. "Cuma dikasih Rp 2 juta, Pak (jaksa)," kata Fajar. Diberitakan sebelumnya, dugaan uang suap yang diterima eks Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani tidak hanya dari seleksi jalur mandiri. Penyuapan juga terjadi melalui penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau jalur reguler.

Fakta ini terkuak dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa (10/1) lalu. Pada dakwaan itu disebutkan Karomani cs telah meluluskan calon mahasiswa dari jalur reguler sebanyak enam orang. ● **pra**



IDN/ANTARA

JALUR ALTERNATIF PENGHUBUNG KABUPATEN SEMARANG-DEMAK TERPUTUS

Kondisi jalur penghubung alternatif Ungaran, Kabupaten Semarang - Mranggen, Kabupaten Demak yang terputus di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1). Putusnya jalur penghubung antarkabupaten tersebut terjadi secara bertahap sejak Februari 2022, Oktober 2022, dan Januari 2023 akibat tanah gerak disertai longsor jalan sepanjang 200 meter dengan kedalaman 50 meter serta cakupan tanah gerak sekitar 16 hektare, sementara itu Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk perbaikan jalan perkampungan sebagai jalur alternatif pengalihan lalu lintas.